

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada 8 kabupaten/kota di provinsi Banten tahun 2010 sampai tahun 2016. Penelitian ini menggunakan analisis data panel. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesisi awal dalam penelitian ini menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Namun setelah dilakukan pengujian statistik menggunakan aplikasi *EViews* 8.0, hasilnya menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan atau dapat dikatakan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Hal ini berarti apabila dana perimbangan meningkat, maka belum tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah juga atau dapat dikatakan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 8 kabupaten/kota di provinsi Banten.

2. Hipotesis awal yang menyatakan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diterima dan signifikan secara statistik. Hal ini berarti kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di provinsi Banten periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, terdapat beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Pengaruh positif namun tidak signifikan yang artinya dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti kenaikan dana perimbangan belum tentu akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pada dasarnya dana perimbangan bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya atau pengalokasiannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerahnya masing-masing untuk kepentingan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten rata-rata prioritas pengalokasian dananya adalah untuk bidang

pendidikan. Hal ini berarti pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Banten masih ingin meningkatkan pelayanan dan kualitas untuk pendidikan masyarakat. Sehingga dana perimbangan dari pemerintah pusat belum berpengaruh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 8 kabupaten/kota di provinsi Banten periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.

2. Pengaruh positif dari pertumbuhan ekonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengindikasikan juga bahwa peningkatan perekonomian akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dilihat dari angka elastisitas PAD, yang menunjukkan angka lebih dari 4 pada 8 kabupaten/kota di provinsi Banten, menunjukkan PAD elastis terhadap PDRB. Misalnya pada pendapatan perkapita masyarakat yang meningkat akan menaikkan pajak daerah yang diatur oleh pemerintah daerah, sehingga dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan kemandirian daerah tanpa bergantung dengan transfer pusat atau dana perimbangan.

### **C. Saran**

Setelah mendapatkan hasil penelitian, adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan pemerintah daerah untuk memanfaatkan atau mengalokasikan dana perimbangannya, hendaknya dimaksimalkan

oleh pemerintah daerah untuk kegiatan atau bidang yang menjadi prioritas masing-masing daerah, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta dapat meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat. Seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, dll.

2. Pemerintah daerah hendaknya lebih berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang mengindikasikan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena PAD elastis terhadap PDRB maka PDRB masih terus bisa untuk dinaikkan. PAD masih bisa dinaikkan tanpa mengganggu perekonomian daerah. Dengan meningkatnya PAD akan menciptakan kemandirian daerah dan tercapainya tujuan desentralisasi fiskal.
3. Pemerintah daerah hendaknya dapat mengevaluasi dana transfer dari pusat atau dana perimbangan dalam pengalokasian dana tersebut, serta melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya inefisiensi terhadap anggaran pemerintah daerah.
4. Pemerintah pusat khususnya dalam hendaknya lebih memperjelas lagi terkait peraturan dana transfer dari pusat. Besarnya berdasarkan apa serta pengalokasiannya untuk apa saja, apakah diseragamkan secara nasional atau berbeda-beda masing-masing daerah. Agar daerah dapat jelas membuat anggaran alokasi dana untuk apa saja yang akan menjadi prioritas daerahnya.

5. Saat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) lebih dimaksimalkan bagaimana target akan yang dicapai. Agar pusat maupun daerah dapat merasakan pembangunan yang semakin baik.